



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
Hayam Wuruk Plaza Lt.17, Jalan Hayam Wuruk No.108, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat 11160
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR : 55/KP.04/IX/2022**

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dengan memperhatikan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengundang dan memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan sebagai berikut:

Nama Jabatan	Jenjang JPT	Unit Kerja
Sekretaris Jenderal	JPT Madya Eselon I/a	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal No. 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
6. Peraturan Sekretaris Jenderal No. 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Nama Jabatan	Tugas Dan Fungsi
Sekretaris Jenderal	<p>Tugas: Menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none">memberikan dukungan teknis operasional kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;memberikan pelayanan administrasi dalam Kerja sama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non-pemerintah terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosio Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi untuk itu;
6. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 2 (dua) tahun terakhir;

7. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp.10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2022;
8. Bersedia untuk menandatangani Pakta Integritas; dan
9. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik.

D. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki kualifikasi Pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV, diutamakan Pascasarjana (S2) atau Magister;
2. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
3. Sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
4. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun per tanggal **1 Oktober 2022**;
5. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, diutamakan telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, kecuali bagi pelamar yang berasal dari pemangku jabatan fungsional jenjang ahli utama; dan
6. Sekurang-kurangnya memiliki Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c).

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui *website* <https://www.komnasham.go.id/seleksi-jptmadya/>; selama **15 hari kalender mulai 13 September 2022 dan ditutup tanggal 27 September 2022 paling lambat pukul 23.59 WIB**;
2. Seluruh berkas lamaran diunggah (*upload*) dalam bentuk *softcopy* (*scan*) dengan format PDF (kecuali untuk foto dalam format jpg/jpeg);
3. Dokumen berkas lamaran adalah sebagai berikut:
 - a. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp.10.000,- **sesuai format pada Lampiran I**;
 - b. KTP;
 - c. Kartu NPWP;
 - d. Pas photo ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna biru;
 - e. Ijazah Terakhir;
 - f. SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - g. SK pangkat terakhir;
 - h. Penilaian Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2020 dan 2021) minimal baik;
 - i. STTP Kepemimpinan Nasional yang dipersyaratkan;
 - j. Tanda terima/lapor LHKASN/LHKPN Tahun 2021;
 - k. Tanda bukti telah menyerahkan SPT Tahun 2021;
 - l. Daftar Riwayat Hidup **sesuai format pada Lampiran II**;
 - m. Surat Persetujuan/ Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi sesuai **sesuai format pada Lampiran III**;

- n. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara dan tidak pernah diberhentikan dengan tidak dengan hormat dari PNS **sesuai format pada Lampiran IV**;
- o. Surat Keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 2 (dua) tahun terakhir bermaterai Rp.10.000,- yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan **sesuai format pada Lampiran V**;
- p. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun **sesuai format pada Lampiran VI**; dan
- q. Makalah/*policy brief* Hak Asasi Manusia dengan tema “**Revitalisasi Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Menjawab/Mengimbangi Tantangan Peran dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai Lembaga Mandiri Setingkat Lembaga Negara**” (maksimal 5 halaman dengan spasi 1,5, ukuran *size* 12, jenis *font* Arial, dengan ukuran kertas A4, *margin* atas/bawah/kanan/kiri 3 cm, rata kanan kiri (*justify*) **sesuai tatacara penulisan pada Lampiran VII**.
4. Seluruh pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi akan disampaikan melalui *website* <https://www.komnasham.go.id/seleksi-jptmadya/>. Untuk itu peserta seleksi diharapkan untuk aktif mengakses *website* tersebut;
5. Bagi peserta yang lulus seleksi penulisan makalah dan akan mengikuti tahapan selanjutnya agar mengunggah (*upload*) dokumen tambahan dalam bentuk *softcopy* (*scan*) melalui *website* <https://www.komnasham.go.id/seleksi-jptmadya/> paling lambat **9 Oktober 2022** sebelum seleksi wawancara dengan Panitia Seleksi. Adapun dokumen tambahan yang diunggah adalah sebagai berikut:
- Scan* Surat Keterangan dari Rumah Sakit/Sehat Pemerintah, yang terdiri dari;
- 1). Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter;
 - 2). Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter Jiwa; dan
 - 3). Surat Keterangan Bebas Narkoba yang lengkap dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 (satu) bulan terakhir.
6. Apabila terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran secara *online*, harap menghubungi Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui nomor telepon (021) 22684250 pada hari kerja hari Senin – Jumat, pukul: 09.00 – 15.00 WIB.

F. TAHAPAN SELEKSI

N O	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penayangan Pengumuman	13 September 2022	
2.	Pendaftaran <i>Online</i> dengan <i>Upload</i> berkas	14 - 24 September 2022	11 hari kalender
3.	Pemeriksaan dan Seleksi administrasi	24 – 27 September 2022	4 hari kalender

4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	28 September 2022	1 hari kerja
5.	Seleksi kompetensi teknis melalui penilaian Makalah/ <i>policy brief</i>	29 September – 3 Oktober 2022	5 hari kerja
6.	Pengumuman Seleksi kompetensi teknis	6 Oktober 2022	1 hari kerja
7.	Seleksi kompetensi Manajerial dan kompetensi Sosio Kultural	10 - 11 Oktober 2022	2 hari kerja
8.	Pengumuman Hasil Seleksi kompetensi Manajerial dan kompetensi Sosio Kultural.	21 Oktober 2022	1 hari kerja
9.	Wawancara dengan Panitia Seleksi	25 – 26 Oktober 2022	2 hari kerja
10.	Pengumuman hasil seleksi akhir	4 November 2022	1 hari kerja

Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan setiap perubahan jadwal akan informasikan melalui website <https://www.komnasham.go.id/seleksi-jptmadya/>.

G. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun;
2. Berkas lamaran yang akan diproses adalah berkas yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
3. Panitia seleksi tidak melakukan komunikasi melalui telepon dan kepada pelamar agar berhati-hati terhadap segala upaya penyalahgunaan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dalam proses seleksi terbuka ini;
4. Segala biaya yang dikeluarkan/dibutuhkan untuk mengikuti seleksi terbuka ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar;
5. Keputusan Panitia Seleksi di setiap tahapan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Mengundang masyarakat untuk memberikan masukan atau informasi mengenai peserta yang dinyatakan lulus administrasi. Masukan tersebut dapat dikirim melalui email Pansel sekretariatjpt@komnasham.go.id.

Jakarta, 13 September 2022
 Plt. Sekretaris Jenderal,
 Selaku Ketua Panitia Seleksi,



Aris Wahyudi

Lampiran I Pengumuman
Nomor : 55/KP.04/IX/2022
Tanggal : 13 September 2022

**Format Surat Lamaran Mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

Yang Terhormat,
Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tahun 2022
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan berkas persyaratan mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1) KTP;
- 2) Kartu NPWP;
- 3) Pas photo ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna biru;
- 4) Ijazah terakhir;
- 5) SK pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- 6) SK pangkat terakhir;
- 7) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- 8) STTP Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
- 9) Tanda terima/lapor LHKASN/LHKPN Tahun 2021;
- 10) Bukti Laporan Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2021;
- 11) Daftar Riwayat Hidup;
- 12) Surat pernyataan persetujuan dari Pejabat Pembina kepegawaian/Pejabat yang Berwenang;
- 13) Surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara dan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS;
- 14) Surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 15) Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun.

Demikian, atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

.....,

Pelamar,

Materai Rp.10.000,-

(nama lengkap pelamar)

NIP.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PESERTA SELEKSI TERBUKA JABATAN
PIMPINAN TINGGI MADYA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Foto berwarna

Background
warna biru

Ukuran 4 x 6

I. DATA PRIBADI PELAMAR

NAMA LENGKAP :

NIP :

PANGKAT/GOLONGAN :

TEMPAT LAHIR :

TANGGAL LAHIR : / /

JENIS KELAMIN : 1. Laki-laki 2. Perempuan

AGAMA : 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha

STATUS PERKAWINAN : 1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Janda/Duda

BAHASA ASING
YANG DIKUASAI : **AKTIF/PASIF**

ALAMAT RUMAH :

:

ALAMAT KANTOR :

:

TELEPON KANTOR :

NO.HP :

E-MAIL :

NPWP :

NIK :

II. KETERANGAN KELUARGA

1. ISTRISUAMI*)

NAMA LENGKAP :

TEMPAT LAHIR :

TANGGAL LAHIR :

PEKERJAAN :

NIK :

2. DAFTAR ANAK

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	L/P	STATUS ANAK

III. RIWAYAT JABATAN

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI	TMT JABATAN	NOMOR SK

DESKRIPSI SINGKAT JABATAN TERAKHIR:

.....

.....

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JURUSAN	NAMA SEKOLAH/PERGURUAN	TAHUN MASUK	TAHUN LULUS

V. PELATIHAN KEPEMIMPINAN

NO.	PELATIHAN KEPEMIMPINAN	NOMOR SERTIFIKAT	TAHUN	PENYELENGGARA

VI. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL/UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

NO.	JENIS PENJENJANGAN	NOMOR SERTIFIKAT	TAHUN	PENYELENGGARA

VII. PENGHARGAAN/PRESTASI YANG DICAPAI

TINGKAT	URAIAN	TAHUN
TINGKAT INSTANSI		
TINGKAT NASIONAL		
TINGKAT INTERNASIONAL		

VIII. PRODUK KEBIJAKAN YANG TELAH DIHASILKAN

NO.	TOPIK KEBIJAKAN	TAHUN

IX. PENGALAMAN ORGANISASI

NO	NAMA ORGANISASI	PERAN	TAHUN

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab.

....., 2022

Mengetahui

(PPK/PyB*)

Pelamar,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Keterangan (*):

- a. Paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bagi pelamar yang berasal dari Kementerian/Lembaga;
- b. Paling rendah oleh Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi pelamar yang berasal dari Pemerintah Daerah; dan
- c. Dipersilahkan menambahkan baris.

FORMULIR

PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN/PEJABAT YANG BERWENANG

Kami selaku Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat Yang Berwenang menyatakan bahwa:

NAMA :

NIP :

JABATAN :

INSTANSI :

Diizinkan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.

Selanjutnya apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi dapat diproses dan ditetapkan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya secara definitif di Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., 2022
PPK/PyB(*)

Nama

NIP.

Keterangan (*):

- Paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bagi pelamar yang berasal dari Kementerian/Lembaga; dan
- Paling rendah oleh Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi pelamar yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Lampiran IV Pengumuman
Nomor : 55/KP.04/IX/2022
Tanggal : 13 September 2022

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Jabatan :
Kementerian/Lembaga :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak pernah dipidana dengan pidana penjara dan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS.

Surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Surat keterangan ini saya buat dengan benar dan dalam keadaan sadar, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala akibat hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

..... 2022

Pelamar



Nama
NIP.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Jabatan :
Kementerian/Lembaga :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Jabatan :
Kementerian/Lembaga :

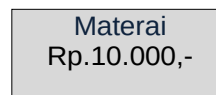
Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Surat keterangan ini saya buat dengan benar dan dalam keadaan sadar, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala akibat hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2022

PPK/PyB(*)



Nama
NIP.

Keterangan (*):

- a. Paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bagi pelamar yang berasal dari Kementerian/Lembaga; dan
- b. Paling rendah oleh Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi pelamar yang berasal dari Pemerintah Daerah.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Jabatan :
Kementerian/Lembaga :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Jabatan :
Kementerian/Lembaga :

Tidak pernah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun

Surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Surat keterangan ini saya buat dengan benar dan dalam keadaan sadar, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala akibat hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2022

PPK/PyB(*)



Nama
NIP.

Keterangan (*):

- a. Paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bagi pelamar yang berasal dari Kementerian/Lembaga; dan
- b. Paling rendah oleh Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi pelamar yang berasal dari Pemerintah Daerah.

**TATA CARA PENULISAN *POLICY BRIEF* DALAM RANGKA
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

1. TEMA PENULISAN

- a. “Revitalisasi Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Menjawab/Mengimbangi Tantangan Peran dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai Lembaga Mandiri Setingkat Lembaga Negara”
- b. *Policy Brief* merupakan pemikiran sendiri dan belum pernah dipublikasikan, serta bukan hasil plagiarisme.
- c. *Policy Brief* mencerminkan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan saat ini atau jabatan yang sedang dilamar.

2. SISTEMATIKA PENULISAN

a. Permasalahan

Deskripsikan secara ringkas masalah-masalah kebijakan yang menjadi inti persoalan.

b. Analisis Permasalahan

Analisis terhadap permasalahan yang menjadi perhatian utama, dengan menggunakan berbagai alat analisis untuk menjelaskan akar-akar permasalahan tersebut. Pada bagian ini juga ditampilkan berbagai alternatif kebijakan untuk merespon persoalan tersebut.

c. Implikasi kebijakan dan rekomendasi kebijakan

Memberikan penjelasan mengenai kebijakan apa yang akan dipilih dan implikasi dari pilihan tersebut.

3. FORMAT PENULISAN

- a. *Policy Brief* ditulis dalam Bahasa Indonesia .
- b. *Policy Brief* diketik maksimal 5 halaman dengan spasi 1,5, ukuran *size* 12, jenis *font* Arial, dengan ukuran kertas A4, *margin* atas/bawah/kanan/kiri 3 cm, rata kanan kiri (*justify*).